PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TIAKUR IBUKOTA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA PROVINSI MALUKU (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR 1835 K/PDT/2019)

Samuel Porsiana Lewier¹, M. Syahrul Borman², Subekti³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: samuelporsiana2@gmail.com

ABSTRAK

Tanah, sebagai salah satu aspek vital bagi keberlangsungan manusia, mempunyai peran yang sangat penting. Kehadiran tanah memberikan potensi besar dalam menghasilkan sumber daya alam yang memberikan manfaat signifikan bagi banyak orang. Namun, pentingnya tanah juga berarti bahwa jumlahnya terbatas, dan oleh karena itu, perlu ada pengaturan dari pemerintah. Perselisihan terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah sering kali muncul dalam masyarakat, dan permasalahan ini semakin meruncing dari tahun ke tahun, menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk baik di perkotaan maupun di pedesaan. Salah satu contoh yang menggambarkan kondisi ini dapat ditemukan di masyarakat Tiakur, Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, seperti yang dicontohkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1835 K/Pdt/2019. Peneliti rumuskan pertanyaan berdasarkan latar belakang tersebut (1) Apa pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa tanah Tiakur Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku? (2) Bagaimana penyelesaian sengketa tanah Tiakur Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku? Metode yang digunakan adalah penelitian Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus, menggunakan teknik analisis deskriptif, hasil penelitian Menunjukkan, bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Frits Hosea Gaspar Pooroe, tersebut harus ditolak. 2. Tanah Tiakur Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku merupakan petuanan bekas Negeri Toinaman seluas ± 4000 Ha (Hecto Are), yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang telah diberikan/dilepaskan haknya oleh para tergugat kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Sengketa Tanah ; Putusan Verstek

ABSTRACT

*Soil, as one of the vital aspects for human survival, has a very important role. The presence of land provides great potential in producing natural resources that provide significant benefits to many people. However, the importance of land also means that the amount is limited, and therefore, there needs to be regulation from the government. Disputes over land ownership and use often arise in communities, and this problem is tapering from year to year, spreading in almost all parts of Indonesia, including both urban and rural areas. One example that illustrates this condition can be found in the community of Tiakur, the capital of Southwest Maluku Regency, Maluku Province, as exemplified in Supreme Court Decision Number 1835 K / Pdt / 2019. The researcher formulates questions based on this background: (1) What is the judge's consideration for the settlement of the land dispute in Tiakur, the capital of Southwest Maluku Regency, Maluku Province? (2) How is the settlement of the land dispute in Tiakur, the capital of Southwest Maluku Regency, Maluku Province? The method used is Normative research with a statutory approach and a case approach, using descriptive analysis techniques, the results of the study show, that the *judex facti* decision / Ambon High Court in this case is not contrary to the law and / or the law, then the cassation application submitted by Cassation Applicant Frits Hosea Gaspar Pooroe, must be rejected. 2. Tiakur Land The capital of Southwest Maluku Regency of Maluku Province is a former Toinaman State lordship covering an area of ± 4000 Ha (Hecto*

Are), located in West Moa, Moa District, Southwest Maluku Regency, which has been granted/released by the defendants to the Southwest Maluku Regency Government.

Keywords: Law Enforcement; Land Disputes ; Verstek Verdict

PENDAHULUAN

Tanah sebagai salah satu sumber kehidupan bagi manusia, mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak dan jumlah yang tetap (terbatas) sehingga perlu diatur oleh pemerintah (Arba 2019). Kehidupan masyarakat dengan tanah merupakan suatu hubungan antara tanah dan penguasaannya, dalam hal ini adalah masyarakat hukum adat, dalam kehidupan sehari-hari menjalankan aktifitas mereka berdasarkan aturan dan norma yang berbeda-beda sesuai dengan adat tradisi yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia (Tahali 2018). Tanah merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia, karenanya tanah sebagai satu-satunya kebutuhan manusia untuk tinggal. Tanah juga merupakan faktor terpenting bukan saja disaat manusia masih hidup, tetapi disaat manusia meninggal dunia, membutuhkan tanah sebagai tempat peristirahatan yang terakhir. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia adalah bahwa kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Mereka hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayakan tanah (Jayadinata 1986).

Tanah akan menunjukkan tingkat status sosial seseorang yang tercermin dari besarnya pengolahan tanah. Semakin banyak tanah yang dimiliki atau dikelola seseorang, semakin tinggi status sosialnya. Ini dapat digunakan sebagai ukuran kinerja sosial seseorang dan sebagai simbol sosial budaya masyarakat. Bagi negara Indonesia yang disebut negara agraris atau negara kepulauan, tanah menempati posisi yang sangat penting dalam kaitannya dengan terwujudnya kehidupan dan kehidupan manusia. Tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tertentu di daerah yang tersebar diseluruh Indonesia. PMNA No.5 di tahun 1999 menyatakan bahwa tanah adat adalah tanah hak ulayat yang dari hukum adat tertentu. Dari ketentuan-ketentuan hukum ini akan timbul hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada diatas tanah dan penguasaan atas tanah.

Hak tersebut adalah hak ulayat, yang merupakan istilah yang diperkenalkan dalam kepustakaan hukum adat dengan sebutan dan/atau nama yang berbeda dalam setiap wilayah hukum adat, dan merupakan penguasaan tertinggi dalam suatu wilayah hukum adat sebab merupakan tanah bersama warga masyarakat adat tertentu (Kertasapoetra 1998).

Pengertian hak ulayat menurut G. Kertasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Tanah, Jaminan UUPA menyatakan, bahwa "Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa dan/atau suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan dan/atau penyalagunaan tanah (Santoso, 2017). Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa dan/atau suku), yang dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan (Samosir 2013).

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, seperti yang telah diuraikan diatas. Sedangkan, konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik-religius magis yang memberikan peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan (Samosir 2013).

Dengan demikian, sengketa tanah dalam masyarakat sering terjadi dimana setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di wilayah Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Seperti yang terjadi di masyarakat Tiakur Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1835 K/Pdt/2019, yang dimana terjadi sengketa hak ulayat antar Frits Hosea Gaspar Pooroe sebagai Penggugat melawan Dominggus Izak A. Lico dan para turut Tergugat lainnya.

Yang mana Penggugat menggugat para Tergugat atas pelepasan hak tanah ulayat sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 02/OL/KML/VIII/2004 kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan objek sengketa seluas 350 Ha (tiga ratus lima puluh hector are), dan penguasaan serta penggunaan Para Tergugat terhadap objek sengketa sejak tahun 2008 sampai dengan 2017 yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa,

Kabupaten Maluku Barat Daya, karena objek tersebut adalah pewarisan dari moyang Penggugat yang bernama Lewanruprupdeli Wewarlaiwewewar, yang adalah Marna/bangsawan dari Moa Barat, yang disebut dengan nama Msawna, yang merupakan pemilik dari tanah petuanan Moa Barat.

Dengan demikian, atas perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melakukan pelepasan hak atas tanah tanpa musyawarah dengan Penggugat yang dalam kasus ini adalah pewaris tanah ulayat tersebut. Oleh karena itu, Penggugat menggugat Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Saumlaki bahwa terhadap gugatan tersebut menjatuhkan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml. Tanggal 17 Mei 2018, yang amarnya menyatakan, menolak Eksepsi Para Tergugat, bahwa Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa dan menyatakan perbuatan Para Tergugat berupa pemberian/pelepasan hak atas tanah tanpa hak dan penguasaan serta penggunaan terhadap objek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

Kemudian, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 38/Pdt/2018/PT AMB. Tanggal 22 Oktober 2018 yang dalam amarnya menerima permohonan banding dari pembanding yang semula adalah Para Tergugat, yang menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samulaki yang dimohonkan dalam tingkat banding.

Berdasarkan putusan banding tersebut, terbanding yang semula adalah Penggugat mengajukan kasasi terhadap banding tersebut ke Mahkamah Agung, yang dalam amar putusan kasasi tersebut menyatakan permohonan kasasi ditolak dan menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000,00.

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan di atas, maka untuk mengatuhi proses pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dan implikasi yuridis dalam pelaksanaan putusan maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Penyelesaian Sengketa Tanah Tiakur Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan

berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana (Ali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan No. 1835 K/Pdt/2019 merupakan putusan tingkat Kasasi dengan perkara pengambilalihan hak milik tanah ulayat menjadi milik pribadi. Pihak yang bersangkutan pada perkara ini yaitu:

- a. Frits Hosea Gaspar Pooroe selaku Penggugat
- b. Dominggus Izak A. Lico selaku Tergugat I
- c. Kundrat F. Wirtha selaku Tergugat II
- d. Johanis Lico selaku Tergugat III
- e. Metusael Tanody selaku Tergugat IV
- f. Fileks Kwuwulay selaku Tergugat V
- g. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Maluku di Ambon, Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki, selaku Tergugat VI
- h. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Maluku di Ambon, Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur-Moa selaku Tergugat VII

Duduk perkara pada kasus ini yaitu Bahwa Penggugat adalah keturunan atau ahli waris yang sah dari Almarhum Moyang LEWANRUPRUPDELI WEWARLAIWEWEWAR, yang semasa hidupnya, adalah Marna/Bangsawan dari Moa Barat, yang disebut dengan nama MSAWNA, yang merupakan pemilik dari tanah petuanan Moa Barat, yang didalamnya terdapat tanah petuanan bekas Negeri Toinaman seluas $\pm$ 4000 Ha (Hecto Are) yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Bahwa oleh karena Penggugat adalah keturunan atau ahliwaris yang sah dari Almarhum Moyang Lewanruprupdeli Wewarlaiwewewar, yang adalah pemilik dari tanah petuanan Moa Barat, yang didalamnya terdapat tanah petuanan bekas Negeri Toinaman seluas $\pm$ 4000 Ha (Hecto Are), maka secara hukum Penggugat adalah merupakan Pemilik yang sah terhadap tanah petuanan bekas Negeri Toinaman seluas $\pm$ 4000 Ha (Empat Ribu Hecto Are), yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Bahwa dari tanah petuanan bekas Negeri Toinaman seluas ± 4000 Ha (Hecto Are), yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, milik Penggugat, sebahagiannya, dengan luas ± 350 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Hecto Are), (2000 X 1750 M2), yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, telah diberikan/dilepaskan haknya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Tergugat VI), sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 02/OL/KML/VIII/2004, untuk kepentingan pemekaran Kabupaten Maluku Barat Daya Bahwa tanah milik Penggugat, dengan luas ± 350 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Hecto Are), (2000 X 1750 M2), yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang adalah merupakan bagian dari tanah petuanan bekas Negeri Toinaman seluas ± 4000 Ha (Hecto Are), milik Penggugat, yang telah diberikan/dilepaskan haknya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Tergugat VI).

Perkara ini telah menempuh sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat dan Tergugat I sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa berupa tanah dengan luas 350 Ha (tiga ratus lima puluh hektar), yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VI, berupa pemberian/pelepasan hak, secara tanpa hak terhadap objek sengketa sesuai Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 02/OL/KML/VIII/2004 dan penguasaan serta penggunaan Tergugat VII terhadap objek sengketa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

- Menyatakan batal demi hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 02/OL/KML/VIII/2004, yang di buat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan Tergugat VI;
- Menghukum Tergugat VI untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dan Tergugat I sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) melalui Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp64.268.800,00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Pada pengadilan tingkat pertama para tergugat tidak terima akan putusan yang telah ditetapkan sehingga para tergugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Ambon dan Majelis Hakim memutuskan dalam Putusan Nomor 38/PDT/2018/PT AMB. Hasil putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 38/PDT/2018/PT AMB., tanggal 22 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat II, III, IV dan V, Pembanding II/semula Tergugat VI, Pembanding III/semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml., tanggal 17 Mei 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat I/Terbanding III/Turut Terbanding II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

- Menerima eksepsi lainnya dari Tergugat I/Terbanding III/Turut Terbanding II, Tergugat II/Pembanding I/Terbanding III, Tergugat III/Pembanding I/Terbanding III, Tergugat IV/Pembanding I/Terbanding III, Tergugat V/Pembanding I/Terbanding III dan Tergugat VII/Terbanding II/Turut Terbanding II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding III/Terbanding I/Terbanding II tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, III, IV dan V dalam Konvensi/Pembanding I tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Pembanding III/Terbanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi Ambon telah menerima permohonan Banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, sehingga penggugat (Frits Hosea Gaspar Pooroe) keberatan atau tidak terima akan putusan Banding dan mengajukan permohonan kasasi yang menghasilkan putusan nomor 1835 K/Pdt/2019 dengan amar putusan yang berbunyi

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Frits Hosea Gaspar Pooroe, tersebut;
- b. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Putusan yang telah ditetapkan pastinya memiliki beberapa pertimbangan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung, berikut beberapa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan Pengadilan Tinggi Ambon yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung ialah sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan tidak jelas karena berdasarkan pemeriksaan setempat terdapat perbedaan batas-batas objek sengketa, dibandingkan dengan surat gugatan, lebih-lebih objek sengketa menyangkut luas dengan besar $\pm$ 350 Ha (tiga ratus lima puluh hecto are);

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Frits Hosea Gaspar Pooroe, tersebut harus ditolak;
- c. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
- d. Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Penyelesaian Sengketa Tanah Tiakur Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku sudah mencapai titik akhir, dimana proses hukum yang berjalan sudah sampai ditahap Kasasi. Beberapa pertimbangan hakim yang telah diputuskan dari proses pada saat di Pengadilan Negeri hingga di Mahkamah Agung.

Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017 /PN Sml, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018 dan dihadiri oleh Kuasa para pihak kemudian berdasarkan risalah Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Arthur Larwuy Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki masing-masing :

- Pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 telah datang menghadap Yafet L. Sahupala, SH. selaku kuasa Pembanding I / semula Tergugat II, III, IV dan V mengajukan permohonan agar perkara Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml tanggal 17 Mei 2018 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.
- Pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 telah datang menghadap Brampi Moriolkusu, SH. selaku kuasa Pembanding II / semula Tergugat VI mengajukan permohonan agar perkara Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml tanggal 17 Mei 2018 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding
- Pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 telah datang menghadap Jopie Stenly Nasarani, SH. dan Risart Ririhena, SH. selaku kuasa Pembanding III / semula Penggugat, mengajukan

permohonan agar perkara Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml tanggal 17 Mei 2018 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Putusan majelis hakim tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam putusan mengenai hubungan antara unsur kesalahan dengan kewajiban untuk membayar ganti kerugian. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang Perbuatan Melanggar Hukum disebutkan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Disatu pihak dalam putusan hakim tingkat pertama menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun dipihak lain yang dihukum untuk membayar ganti kerugian hanya Tergugat VI dengan tanpa mempertimbangkan sebab apa Tergugat I, II, III, IV dan V dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Seharusnya apabila dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum mestinya dihukum juga untuk membayar ganti rugi, putusan hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan alasan membebaskan Tergugat-Tergugat lainnya dari kewajiban membayar ganti rugi dapat dikwalifikasi sebagai putusan yang kurang dalam pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Sml tanggal 17 Mei 2018 tidak sesuai dengan tata tertib beracara yang benar, telah memutus perkara tidak sesuai dengan dasar gugatan, dan kurang pertimbangan hukum. Karenanya menurut pendapat majelis hakim tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 29/Pdt.G/2017 /PN Sml tanggal 17 Mei 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Putusan hakim tingkat pertama dibatalkan, maka majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan alasan sebagai berikut : a). Bahwa karena yang digugat juga, adalah perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII, sebagai badan hukum public, maka Pengadilan Negeri Saumlaki tidak berkompeten atau tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Sml. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan PT. Bandung

No.69/1970/Perd./PTB, tanggal 15-5-1970, bahwa “perselisihan mengenai perbuatan pemerintahan (bestuursdaad) adalah tidak termasuk wewenang Pengadilan untuk mengadilinya”. Oleh karena Pengadilan Negeri Saumlaki tidak berwenang mengadili perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII, maka Tergugat I menolak tegas gugatan untuk diadili di Pengadilan Negeri Saumlaki; b). Oleh sebab itu, sebelum Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa pokok perkara Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Sml., tersebut, maka Tergugat I mohon perkenaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dikesempatan pertama, memeriksa dan memutus lebih dulu kompetensi Pengadilan Negeri Saumlaki dalam perkara tersebut, sekaligus menyatakan Pengadilan Negeri Saumlaki tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Sml. Alasan Tergugat I ini sejalan dengan pasal 136 HIR dan 162 R.Bg Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat I tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak semua perbuatan pemerintah (bestuursdaad) tidak dapat diajukan dan diperiksa di peradilan umum;

Apabila mengacu pada Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada dasarnya yang tidak dapat diadili oleh peradilan umum adalah apabila menyangkut perbuatan pemerintah yang berbentuk keputusan tata usaha negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tatausaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.

Perkara *a quo* tidak mempersoalkan mengenai surat keputusan yang bersifat kongkrit, individual dan final yang dibuat Tergugat VI dan Tergugat VII, akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI dan VII, yang masuk kedalam lingkup hubungan hukum keperdataan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat I tidak cukup beralasan karenanya harus ditolak dan Pengadilan Negeri Saumlaki harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Atas gugatan Penggugat tersebut, selain eksepsi mengenai kewenangan mengadili, Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut Terbanding II/Terbanding III, dalam jawabannya juga mengajukan 6 poin eksepsi diantaranya yang relevan untuk dipertimbangkan dalam hubungannya dengan persyaratan formal gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam eksepsinya Tergugat I menilai bahwa gugatan Penggugat kabur (*abscuure liabele*) dalam angka 4 huruf a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya, tidak menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara moyang Penggugat Lewanruprdeli Wewarlaiwewewar, dengan asal usul tanah petuanan Moa Barat seluas $\pm$ 4.000 Ha (empat ribu hektar) (posita gugatan angka 1) yang diklaim sebagai petuanan bekas Negeri Toinaman yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam angka (2) gugatan, yang di dalamnya terdapat objek sengketa + 350 Ha (tiga ratus limapuluh hektar). Posita gugatan yang tidak menguraikan secara rinci asal-usul obyek sengketa, riwayat perolehan sehingga moyang Penggugat Lewanruprdeli Wewarlaiwewewar bisa memiliki tanah obyek sengketa dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*abscuure liabele*); Selanjutnya dalam angka 4 huruf b. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan pula hubungan hukum antara Moyang Penggugat tersebut dengan Negeri Toinaman atau sebaliknya, sebab apa dan bagaimana faktanya sehingga petuanan bekas Negeri Toinaman sebagai *beschikingsrecht* meminjam istilah Prof.Mr.Dr.Van Vollenhoven yang kemudian menjadi *inlands bezitrecht* (meminjam terminology Ter Har) lalu dapat diwariskan turun temurun kepada Penggugat? Dalam Hukum Adat, *beschikingsrecht* tidak bisa dengan serta merta dikuasai dan atau dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kedudukan adat tertinggi sekalipun (*primus inter pares*) dalam komunitas masyarakat hukum adat misalnya Raja, sebagaimana dalam masyarakat Negeri Toinaman, melainkan menjadi hak anggota komunal tersebut juga, yang kini masih menyisakan anak-anak adat turunan yang berasal dari bekas Negeri Toinaman, yang mengaku berhak atas bagian petuanan bekas Negeri Toinaman.
- 2) Dalam eksepsinya Tergugat I juga menilai bahwa gugatan Penggugat antara posita gugatan dengan petitum, tidak sesuai karena:
 - a) Penggugat yang mengklaim Moyangnya Lewanruprdeli Wewarlaiwewewar sebagai pemilik tanah petuanan bekas Negeri Toinaman di Kecamatan Moa Barat seluas $\pm$ 4.000 Ha (empat ribu hektar) dan pemilik objek sengketa seluas $\pm$ 350 Ha (tiga ratus limapuluh hektar) ternyata pada bagian posita gugatannya, tidak meminta dalam petitum supaya pengadilan menetapkan Lewanruprdeli Wewarlaiwewewar Moyang Penggugat sebagai pemilik sah tanah petuanan bekas Negeri Toinaman di Kecamatan Moa Barat

- seluas ± 4.000 Ha (empat ribu hektar) dan pemilik objek sengketa seluas ± 350 Ha (tiga ratus limapuluh hektar) di dalamnya;
- b) Penggugat yang mengklaim Moyangnya Lewanruprupdeli Wewarlaiwewewar sebagai pemilik tanah petuanan bekas Negeri Toinaman di Kecamatan Moa Barat seluas ± 4.000 Ha (empat ribu hektar) dan pemilik objek sengketa seluas ± 350 Ha (tiga ratus limapuluh hektar) ternyata pada bagian fundamentum petendi gugatannya, tidak meminta dalam petitum supaya pengadilan menetapkan Lewanruprupdeli Wewarlaiwewewar Moyang Penggugat sebagai pewaris sah atas objek tersebut;
- c) Penggugat yang mengklaim dirinya sebagai ahli waris dalam posita gugatan, ternyata tidak menuntut dalam petitum supaya pengadilan menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari Moyangnya Lewanruprupdeli Wewarlaiwewewar atas objek sengketa. Karena itu, permintaan sebagai pemilik objek sengketa dalam petitum angka (2) adalah tidak logis dan gugatan kabur, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima atau ditolak tegas.
- 3) Dalam eksepsinya Tergugat II s/d V dan Tergugat VII menilai bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sebagaimana eksepsinya angka 1. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 4 memohon agar “menyatakan batal demi hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 02/OL/KML/VIII/2004, yang di buat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan Tergugat VI”. Akan tetapi tidak semua yang menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 02/OL/KML/VIII/2004, tersebut ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo. Sebagaimana eksepsi yang disampaikan Tergugat II s/d Tergugat V “.....telah melibatkan bukan saja para ahli waris namun juga para kepala desa, dan atau pemilik petuanan, Pimpinan Latupatti serta camat Moa Lakor, oleh sebab itu maka Kepala desa Werwaru, Kepala desa Patti, Kepala Desa Wakarlely, Kepala desa Klis, Kepala desa Kaiwatu, Kepala desa Tounmawan, Ketua Latupatti serta Camat Moa Lakor telah memiliki urgensi untuk turut membuktikan juga proses Pelepasan Hak tersebut, oleh sebab Penggugat hanya mencantumkan Tergugat I, III, dan Tergugat IV selaku mantan kepala desa padahal pada saat itu Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV serta Kepala desa Kaiwatu Bpk Salmon Mehdila dan Bpk Charles R. Lico selaku kepala Desa Tounmawan melakukan Perbuatan Hukum dengan menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Bersama No.

02/0L/KMLA/III/2004 tertanggal 8 Agustus 2004 adalah dalam kapasitas atau jabatan mereka selaku Kepala Desa, dan oleh sebab itu dengan tidak ditariknya Kepala Desa Werwaru, Kepala Desa Patti, Kepala Desa Wakarlely, Kepala Desa Klis, Kepala Desa Kaiwatu, Kepala Desa Tounmawan, Ketua Latupatti serta camat Moa Lakor, selaku pihak dalam perkara ini maka faktanya Penggugat tidak mengikut sertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan surat tersebut. Dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikwalifisir sebagai kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

- 4) Bahwa dalam dalil gugatannya disebutkan bahwa Penggugat adalah keturunan atau ahli waris yang sah dari Moyang Lewanruprupdeli Wewarlaiwewewar namun tidak menjelaskan hubungan hukum antara Lewanruprupdeli Wewarlaiwewewar sebagai pewaris dengan Penggugat sebagai ahli waris. Kalau menyebutkan keturunan dari seseorang mestinya dijelaskan keturunan garis keberapa dan bagaimana silsilah keluarganya, siapa saudaranya dan lain sebagainya. Jika hanya menyebutkan keturunan atau ahli waris saja sebagaimana dalam gugatan a quo dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuuri libeli);

Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat majelis hakim tingkat banding cukup beralasan menurut hukum karenanya eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII tersebut dapat diterima dan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (obscuuri libeli) dan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karenanya tidak memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara a quo;

Karena eksepsi diterima dan surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dan majelis hakim tingkat banding tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara;

Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II s/d V Dalam Konvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi salah satu diantaranya agar menyatakan bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan para Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal gugatan rekonvensi. Tergugat II, III, IV dan V Dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi, setelah mencermati posita angka 1 sampai angka 7 gugatan Rekonvensinya nampak tidak jelas kepada siapa gugatan rekonvensi tersebut ditujukan. Akan tetapi bila membaca posita angka 8 dan dihubungkan dengan petitum angka 4 dan 5 baru jelas bahwa para Penggugat

dalam Rekonvensi menggugat agar Tergugat VII Dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Tergugat II, III, IV dan V Dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi.

Pada azasnya gugatan rekonvensi dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Tergugat untuk menantang gugatan Penggugat, maka dengan demikian subyek yang dapat ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi. Sebagaimana diketahui bahwa Tergugat VII mempunyai kedudukan yang sama dengan Tergugat II s/d Tergugat V, yaitu sama-sama kedudukannya sebagai Tergugat Konvensi, oleh karena itu dilarang dan tidak dibenarkan untuk menarik sesama Tergugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi. (Putusan MA No. 636/K/Pdt/1984 tanggal 17 Desember 1985 IV, Putusan MA No. 1501/K/Pdt/1983 tanggal 6 Desember 1984 dan Putusan MA No. 3227/K/Pdt/1987 tanggal 29 Januari 1989);

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka gugatan rekonvensi tersebut telah melanggar tertib hukum acara dan karenanya eksepsi tergugat rekonvensi / penggugat konvensi beralasan hukum dan dapat diterima;

Pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung melakukan beberapa pertimbangan yaitu Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan tidak jelas karena berdasarkan pemeriksaan setempat terdapat perbedaan batas-batas objek sengketa, dibandingkan dengan surat gugatan, lebih-lebih objek sengketa menyangkut luas dengan besar $\pm$ 350 Ha (tiga ratus lima puluh hecto are); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FRITS HOSEA GASPAR POOROE, tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hukum tanah yang berlaku bagi masyarakat Indonesia secara umum adalah hukum tanah yang masih berpedoman pada hukum adat masing-masing suku yang berdiam diseluruh wilayah nusantara, yang lasim disebut dengan istilah hak ulayat. Hak ulayat merupakan istilah yang diperkenalkan dalam kepustakaan hukum adat dengan sebutan dan atau nama yang

berbeda dalam setiap wilayah hukum adat, dan merupakan hak penguasaan tertinggi dalam suatu wilayah hukum adat sebab merupakan tanah bersama warga masyarakat adat tertentu.

Pengertian hak ulayat sendiri tidak ditemukan dalam UUPA, bahkan kata hak ulayat hanya di kemukakan dalam pasal 3 dinyatakan;

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang peraturan lain yang lebih tinggi.”

Pengakuan akan Hak Ulayat oleh Undang-Undang Pokok Agraria harus disertai syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat dalam masyarakat (masih merupakan kenyataan yang hidup) artinya hak ulayat itu masih berfungsi dalam masyarakat dan masih dipatuhi dalam masyarakat sebagai suatu lembaga dari masyarakat.
- 2) Hak Ulayat harus disesuaikan dengan kepentingan Nasional, artinya ada prinsip nasionalitas,
- 3) Hak ulayat harus disesuaikan dengan kepentingan negara,
- 4) Hak ulayat harus berdasarkan pada kesatuan bangsa.
- 5) Hak ulayat haruslah Unterorgened (tunduk pada UU, mapun peraturan lainnya yang diterbitkan Pemerintah Indonesia.)

Hak Ulayat dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. Hak-hak perorangan atas sebagian tanah bersama tersebut secara langsung ataupun tidak langsung bersumber padanya, yaitu (Maiyestati, 2022)

- 1) Pemegang Haknya
- 2) Objek Hak Ulayat
- 3) Kekuatan Hak Ulayat Berlakunya Ke Dalam
- 4) Kekuatan Hak Ulayat Berlaku Ke Luar

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. UUPA

merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UU 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu atas dasar ketentuan dalam pasal 33 Pasal Ayat (3) undang-undang dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Tanah Tiakur Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku merupakan petuanan bekas Negeri Toinaman seluas $\pm$ 4000 Ha (Hecto Are), yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang telah diberikan/dilepaskan haknya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Tergugat VI), sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 02/OL/KML/VIII/2004, untuk kepentingan pemekaran Kabupaten Maluku Barat Daya.

Penggugat mendalilkan bahwa moyang Penggugat yang bernama Lewanruprupdeli Wewarlaiwewear semasa hidupnya adalah marna/bangsawan dari Moa Barat yang disebut dengan nama MSAWNA, padahal Moyang Penggugat ini bukanlah seorang Bangsawan atau Marna di Moa Barat apalagi memiliki Petuanan, karena Moyang Penggugat pada saat masuk dan berdiam di Moa Barat, Pulau Moa sudah dibagi habis oleh 3 Orang Moyang yaitu : Moa Timur (desa Moain), dimiliki oleh moyang yang bernama Reimaha Lewna, Moa Tengah (desa Klis/ SOA Lekubun) dengan moyang bernama Mayaha Lewna, dan Moa barat (Desa Patti/SOA Rokseli, SOA Patti dan Soa Gerwelsa) dimiliki oleh Moyang Talupipi Lewna, jadi moyang Penggugat tidaklah turut membagi Pulau Moa, lagipula Moyang Penggugat selama hidupnya bahkan sampai dengan keturunannya (anak cucu) sekarang termasuk Penggugat tidak pernah menjadi seorang Raja atau Kepala Desa pada desa-desa di Moa Barat, sebab untuk menjadi Raja atau Kepala Desa di Pulau Moa haruslah dari Keturunan bangsawan atau Mama.

Penggugat melakukan gugatan untuk mempertahankan hak miliknya berupa tanah petuanan Moa Barat, yang didalamnya terdapat tanah petuanan bekas Negeri Toinaman seluas $\pm$ 4000 Ha (Hecto Are). Akan tetapi pada tahap banding penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penggugat merupakan keturunan langsung dari Almarhum Moyang LEWANRUPRUPDELI WEWARLAIWEWEWAR, dan hal ini dibantah oleh para tergugat bahwa Moyang penggugat bukanlah keturunan bangsawan atau Mama. Sedangkan, para tergugat

memiliki bukti yang sah tentang kepemilikan atas tanah ulayat tersebut yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 02/OL/KML/VIII/2004.

Surat Pelepasan Hak Nomor: 02/OL/KML/VIII/2004 dikuatkan dengan:

- 1) Pernyataan sikap atas hasil rapat koordinasi dengan Tim Koordinasi Awal Pembangunan Kota Tiakur yang terdiri dari Bastian Y.A. Petrusz, S.Pd dkk, yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2011 bertempat di desa Wakarleli;
- 2) Pernyataan beberapa pihak yang termasuk pemilik lahan 350 Ha yang merupakan Kota Tiakur untuk melepaskan hak atas tanah dimaksud dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi A DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 9 November 2013;
- 3) Bahwa didalam Surat Pernyataan tersebut terdapat nama Penggugat sebagai salah satu pihak yang secara jelas menyatakan secara jujur dan penuh keikhlasan melepaskan hak Atas Tanah seluas 350 Ha (2000 x 1750 M2) kepada Pemerintah Maluku Barat Daya dan mendukung segala aktifitas pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah diatas tanah petuanan tersebut. Bahkan didalam Pernyataan tersebut secara tegas Penggugat sebagai salah satu pihak menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari pihak tertentu maka segala resiko menjadi beban para pihak termasuk Penggugat;
- 4) Surat Pernyataan bersama oleh pemilik tanah, pemerintah Desa Pati, Desa Wakarleli, Desa Kaiwatu, Tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh-tokoh adat termasuk Toinaman yang pada intinya memperkuat Surat Pelepasan Tanah Nomor : 02/OL/KML/VIII/2004 dan menyatakan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya diberikan hak bebas untuk menentukan batas-batas tanah sesuai peruntukan bagi lahan Kota Tiakur seluas 350 Ha serta tidak lagi mempersoalkan status tanah dimaksud;

Majelis Hakim pada sidang tingkat pertama telah salah dan keliru dalam Pertimbangan Hukumnya, sehingga telah membatalkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 02/OL/KML/VIII/2004, padahal Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut ditandatangani oleh semua kepala desa di Pulau Moa yaitu Kepala Desa Wakarleli, Kepala Desa Pati, Kepala Desa Kaiwatu, Kepala Desa Werwaru, Kepala Desa Tounwawan, Kepala Desa Klis, Ketua dan Sekretaris Latupaty Pulau Moa dan disahkan oleh Camat Moa Lakor, guna dan untuk memenuhi salah satu persyaratan pemekaran daerah otonom baru yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Pasal 7 yang Menyatakan "Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya

berkedudukan di Tiakur Kecamatan Moa Lakor.” Dengan membatalkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 02/OL/KML/VIII/2004 maka telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 02/OL/KML/VIII/2004 maka kepemilikan tanah tersebut merupakan tanah ulayat dan penggugat tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Pengakuan akan Hak Ulayat oleh Undang-Undang Pokok Agraria harus disertai syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat dalam masyarakat (masih merupakan kenyataan yang hidup) artinya hak ulayat itu masih berfungsi dalam masyarakat dan masih dipatuhi dalam masyarakat sebagai suatu lembaga dari masyarakat. Pada kasus ini tanah tersebut masih digunakan oleh Masyarakat Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya.
- 2) Hak Ulayat harus disesuaikan dengan kepentingan Nasional, artinya ada prinsip nasionalitas.
- 3) Hak ulayat harus disesuaikan dengan kepentingan negara,
- 4) Hak ulayat harus berdasarkan pada kesatuan bangsa.
- 5) Hak ulayat haruslah Unterorgened (tunduk pada UU, mapun peraturan lainnya yang diterbitkan Pemerintah Indonesia.)

Tanah ulayat digunakan untuk kepentingan nasional yaitu peluasan Kabupaten Maluku Barat Daya yang mengacu pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya yang menyatakan “Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya berkedudukan di Tiakur Kecamatan Moa Lakor.”

KESIMPULAN

- a. Pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung melakukan beberapa pertimbangan yaitu Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut; bahwa gugatan tidak jelas karena berdasarkan pemeriksaan setempat terdapat perbedaan batas-batas objek sengketa, dibandingkan dengan surat gugatan, lebih-lebih objek sengketa menyangkut luas dengan besar ± 350 Ha (tiga ratus lima puluh hecto are); Menimbang, bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Frits Hosea Gaspar Pooroe, tersebut harus ditolak.

- b. Tanah Tiakur Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku merupakan petuanan bekas Negeri Toinaman seluas ± 4000 Ha (Hecto Are), yang terletak di Moa Barat, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang telah diberikan/dilepaskan haknya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Tergugat VI), sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 02/OL/KML/VIII/2004, untuk kepentingan pemekaran Kabupaten Maluku Barat Daya. Berdasarkan Surat tersebut maka kepemilikan tanah merupakan tanah ulayat yang diakui keberadaannya serta masih dimanfaatkan oleh Masyarakat dan Pemerintah sehingga penggugat tidak memiliki hak atas tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Bela. 2018. "Penyelesaian sengketa tumpang tindih hak antara sertipikat hak milik (SHM) dengan surat keterangan tanah (SKT) di kota Pangkalpinang."
- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan."
- Arba, H. M. 2019. "Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta." *Cet. Ke. IV*.
- Arba, Muhammad. 2021. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Azam, Syaiful. 2003. "Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria."
- Dewanto, Bisma Aryo. 2021. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan Masyarakat Marga Mansim (Studi Kasus di Maruni Kabupaten Manokwari)."
- Gustio, Andrian. 2022. "Penyelesaian Sengketa Pemberian Hak Milik Di Atas Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya."
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Tahali, Ahmad. 2018. "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5(1):27–46.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) KUHPerdata (*Burgerlijk Wetbook*)
- Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Perubahan kedua Undang
- Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.